

PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (KUR) PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP PARE KEDIRI: PROSEDUR DAN TANTANGANNYA

Dewi Maslachah¹, Imam Sopingi²

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang^{1,2}

E-Mail: dewi.maslachah222@gmail.com, m.imam290983@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the procedures and challenges in financing micro-enterprises through People's Business Credit (KUR) at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pare Kediri. This study uses a qualitative descriptive approach method with data obtained through in-depth interviews, observations, and research in the office. The results of the study indicate that the KUR financing procedure at BSI includes document collection, business feasibility analysis, financing contracts according to sharia principles and capital disbursement. This process prioritizes respect for sharia values with programs such as murabahah and ijarah. However, there are various challenges faced such as the low level of sharia financial literacy among customers, limited access to micro-business documents and the impact of economic instability on the continuity of business operations. This study recommends strengthening sharia financial literacy, increasing procedural efficiency, and developing risk mitigation strategies to support the sustainability of sharia-based KUR financing. Showing the need for financial education programs, innovative administrative procedures, and improving risk mitigation strategies to improve financial performance. These results are expected to contribute to optimizing the implementation of sharia-based KUR.

Keywords: *Sharia Financing, People's Business Credit, Bank Syariah Indonesia, Micro Business, Procedures and Challenges.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan tantangan dalam pembiayaan usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pare Kediri. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelitian di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan KUR di BSI meliputi pengumpulan dokumen, analisis kelayakan usaha, kontrak pembiayaan sesuai prinsip syariah dan pencairan modal. Proses ini mengutamakan penghormatan terhadap nilai-nilai syariah dengan program seperti murabahah dan ijarah. Namun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan nasabah, keterbatasan akses terhadap dokumen usaha mikro dan dampak ketidakstabilan perekonomian terhadap kelangsungan operasional usaha. Studi ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan syariah, peningkatan efisiensi prosedur, dan pengembangan strategi mitigasi risiko untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan KUR berbasis syariah. Menunjukkan perlunya program pendidikan keuangan, prosedur administrasi yang inovatif, dan peningkatan strategi mitigasi risiko untuk meningkatkan kinerja keuangan. Hasil ini diharapkan dapat berkontribusi dalam optimalisasi penerapan KUR berbasis syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Kredit Usaha Rakyat, Bank Syariah Indonesia, Usaha Mikro, Prosedur dan Tantangan.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Rosidayanti *et al.*, 2023). Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Sebagai salah satu solusi, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro dengan margin yang terjangkau (Anisa *et al.*, 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, turut berperan aktif dalam mendukung program KUR melalui pembiayaan berbasis syariah (Kholbi *et al.*, 2023). Pemberian KUR di BSI dilakukan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah dan ijarah, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan usaha. BSI KCP Pare Kediri, sebagai salah satu unit pelayanan BSI, memfokuskan pembiayaan KUR untuk mendukung usaha mikro di wilayahnya (Mongkito *et al.*, 2021).

Namun, implementasi KUR di sektor perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya kelengkapan dokumen usaha dari calon nasabah, serta fluktuasi kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan pengembalian pembiayaan (Suri & Berliana, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian KUR di BSI KCP Pare Kediri serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan dan layanan pembiayaan syariah di masa mendatang (Wulandari & Setiyowati, 2022).

Adapun Produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kediri Pare adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank
Syariah Indonesia KCP Pare Kediri

No	Produk	Plafon (juta)	Tenor (Bulan)		Margin
			Investasi	Modal Kerja	
1.	KUR Super Mikro	10	60	36	3%
2.	KUR Mikro	>10-100	60	36	6%
3.	KUR Kecil	>100-500	60	48	6%

Sumber: Data Brosur KUR BSI KCP Pare Kediri 2024

Dilihat dari tabel 1 dapat dijelaskan ada beberapa produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Kediri berikut adalah penjelasannya lebih rinci. (1) **KUR Super Mikro** yaitu plafon pembiayaan yang ditunjukkan bagi pelaku usaha mikro yang baru memulai atau membutuhkan modal kecil dengan plafon pembiayaan maksimal Rp 10 juta. Pembiayaan untuk kebutuhan investasi, tenor pembiayaannya dalam jangka waktu tenor 60 bulan (5 tahun). Hal ini memberikan waktu yang sangat cukup bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha secara bertahap. Selain itu, untuk kebutuhan modal kerja, tenor yang lebih singkat, yaitu 36 bulan (3 tahun). Margin yang ditetapkan hanya 3% per tahunnya. (2) **KUR Mikro** yaitu plafon pembiayaan produk yang dikategorikan sebagai KUR Mikro, lebih besar dibandingkan super mikro, yakni berkisaran antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. Kategori ini menyasar pelaku usaha mikro yang sudah memiliki usaha berkembang tetapi tetap dalam skala kecil. Pembiayaan untuk kebutuhan tenor investasi sama seperti super mikro, tenor pembiayaannya dalam jangka waktu 60 bulan (5 tahun). Sedangkan untuk kebutuhan tenor modal kerja memiliki tenor yang lebih singkat, yaitu 36 bulan (3 tahun). Margin yang ditetapkan hanya 6% per tahunnya, yang termasuk masih rendah dan terjangkau. (3) **KUR Kecil** yaitu plafon pembiayaan produk ini dikategorikan untuk pelaku usaha kecil dengan plafon lebih besar, yakni mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Pembiayaan untuk kebutuhan tenor investasi, tenor pembiayaannya dalam jangka waktu 60 bulan (5 tahun), memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam pengembangan

usaha. Sedangkan untuk kebutuhan tenor modal kerja, tenor pembiayaannya sedikit lebih panjang dibandingkan kategori lainnya, yakni hingga 48 bulan (4 tahun). Margin yang ditetapkan sama dengan KUR Mikro, yakni 6% pertahunnya.

Jadi untuk KUR Super Mikro sangat cocok pelaku usaha pemula atau yang membutuhkan modal minimal, dengan margin rendah (3%) yang sangat membantu. Untuk KUR Mikro menyasar pada pengusaha yang sudah berkembang, yang memberikan lebih tinggi hingga mencapai Rp 100 juta. Untuk KUR Kecil Mendukung pada pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal lebih besar untuk ekspansi atau investasi dengan tenor lebih fleksibel. Dengan produk-produk ini BSI KCP Pare Kediri sangat memberikan solusi pembiayaan yang disesuaikan dengan berbagai tahapan dan kebutuhan usaha (Huda & Yunita, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami prosedur dan tantangan dalam implementasi pembiayaan Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pare Kediri. Metode ini dipilih untuk menggali informasi mendalam terkait proses pemberian pembiayaan serta kendala yang dihadapi baik oleh pihak bank maupun nasabah.

Metode penelitian kualitatif menawarkan pendekatan yang fleksibel dan mendalam dalam menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks (Harnilawati *et al.*, 2024). Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman, keyakinan, dan perspektif subjektif dari individu atau kelompok yang diteliti (Manalu *et al.*, 2024).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai bank yang terlibat dalam proses KUR dan nasabah penerima pembiayaan. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan semi-terstruktur untuk menjaga fokus sekaligus memungkinkan eksplorasi lebih lanjut. Selain itu,

observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan di bank dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang prosedur yang diterapkan.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, seperti laporan kebijakan, panduan prosedur pembiayaan, dan data statistik terkait KUR di BSI. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan (Abdussamad *et al.*, 2024). Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi KUR di bank syariah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan KUR di BSI KCP Kediri Pare

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pare Kediri menjalankan prosedur yang sistematis dalam menyalurkan pembiayaan KUR untuk pelaku usaha mikro. Proses ini mencakup tahapan pengajuan, verifikasi dokumen, survei lapangan, analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad syariah, hingga pencairan dana. Prosedur tersebut dirancang untuk memastikan nasabah yang menerima pembiayaan adalah individu atau usaha yang layak dan dapat bertanggung jawab atas dana yang diberikan. Namun, birokrasi yang ketat dan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi sering menjadi kendala bagi calon nasabah, khususnya pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha seperti Surat Izin Usaha atau laporan keuangan. Prosedur ini membutuhkan sinergi antara nasabah dan bank agar pembiayaan dapat berjalan secara efektif (Ervina *et al.*, 2023).

Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) bertujuan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan prinsip syariah. Berikut adalah langkah-langkahnya: (1) Pengajuan Permohonan oleh Nasabah yaitu nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan KUR harus datang ke kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) terdekat. Nasabah diwajibkan membawa dokumen pendukung seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP); Kartu Keluarga (KK); dan Surat izin usaha (SIU) atau dokumen yang setara sebagai bukti keberadaan usaha. (2) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen yaitu petugas BSI memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh nasabah untuk memastikan persyaratan administratif terpenuhi. (3) Survei

Lapangan yaitu Bank melakukan survei lapangan ke lokasi usaha calon penerima KUR. Tujuannya adalah memastikan usaha tersebut benar-benar ada dan berjalan. Selain itu, survei ini juga untuk mengevaluasi kelayakan usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. (4) Analisis Kredit yaitu setelah survei, bank melakukan analisis lebih lanjut mengenai kelayakan usaha, kebutuhan modal, dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan. Penilaian ini mencakup analisis kemampuan bayar, arus kas usaha, dan potensi usaha untuk berkembang. (5) Persetujuan Pembiayaan yaitu jika hasil analisis memenuhi kriteria, pihak bank menyetujui permohonan pembiayaan KUR. Keputusan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan kebijakan internal bank. (6) Penandatanganan Akad yaitu nasabah yang permohonannya disetujui akan menandatangani akad pembiayaan berbasis syariah sesuai dengan jenis pembiayaan (misalnya *akad murabahah* atau *akad ijarah*). Proses ini disertai dengan penjelasan mengenai hak dan kewajiban nasabah. (7) Pencairan Dana yaitu setelah akad ditandatangani, dana KUR akan dicairkan oleh bank ke rekening nasabah. Dana ini digunakan sesuai tujuan yang disepakati, seperti untuk modal kerja atau investasi usaha. (8) Pemantauan dan Pembinaan yaitu BSI melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan usaha nasabah berjalan dengan baik. Jika diperlukan, bank memberikan pendampingan atau pembinaan kepada nasabah untuk mendukung keberhasilan usaha.

Prosedur tersebut dirancang untuk memastikan penyaluran KUR berjalan efektif, sesuai prinsip syariah, dan memberikan manfaat bagi nasabah serta mendukung pertumbuhan UMKM (Fitriana *et al.*, 2024).

Tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan KUR

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk di Bank Syariah Indonesia (BSI), tidak terlepas dari berbagai tantangan (Fitriansyah *et al.*, 2023). Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi: (1) Ketidaklengkapan dokumen nasabah yaitu banyak pelaku usaha mikro belum memiliki kelengkapan dokumen yang diperlukan, seperti Surat Izin Usaha atau laporan keuangan. Hal ini menjadi kendala dalam proses verifikasi dan analisis kelayakan usaha. (2) Rendahnya pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah yaitu

beberapa calon nasabah kurang memahami perbedaan prinsip pembiayaan syariah dengan konvensional. Akibatnya, mereka sering ragu untuk mengajukan KUR di bank syariah atau memiliki persepsi yang salah terkait akad-akad syariah. (3) Kapasitas manajerial dan literasi keuangan pelaku usaha yaitu banyak pelaku usaha mikro memiliki kapasitas manajerial yang terbatas dan kurang memahami literasi keuangan. Hal ini dapat memengaruhi penggunaan dana pembiayaan, sehingga ada risiko dana tidak digunakan sesuai tujuan awal. (4) Kurangnya pendampingan nasabah yaitu beberapa nasabah membutuhkan pendampingan atau pelatihan untuk mengelola usaha mereka secara optimal. Namun, keterbatasan sumber daya di bank sering kali membuat pendampingan ini sulit dilakukan secara berkelanjutan. (5) Faktor Eksternal yaitu kondisi eksternal seperti pandemi, fluktuasi harga bahan baku, atau perubahan regulasi juga dapat memengaruhi keberhasilan program KUR. Situasi ini sering tidak terduga dan di luar kendali bank maupun nasabah.

Pembiayaan KUR Mikro yang Dihindari

Berdasarkan tabel 2 ada beberapa daftar jenis usaha/profesi/pekerjaan yang sebaiknya dihindari untuk diberikan pembiayaan pada segmen mikro berdasarkan aspek syariah.

Tabel 2

Jenis usaha/profesi/pekerjaan yang dihindari untuk diberikan pembiayaan pada segmen mikro berdasarkan aspek syariah

Aspek Syariah	Pengertian	Jenis usaha
Mengandung unsur <i>mudharat</i>	Jenis usaha yang kegiatan atau transaksi mendatangkan suatu kerugian besar dibandingkan dengan manfaat yang diterima.	○ Perkebunan atau perdagangan bahan baku pembuatan rokok. ○ Industri pembuatan rokok, termasuk karyawan
Mengandung unsur <i>maysir</i>	Jenis usaha yang mengandung kegiatan atau transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, yang mengandung unsur perjudian.	○ Usaha perjudian ○ Jual beli sahan dan sejenisnya.
Mengandung unsur <i>dzalim</i>	Jenis usaha yang mengandung kegiatan atau transaksi yang menimbulkan kerugian, ketidakadilan, penderita bagi	○ Usaha yang terkategori ilegal logging. ○ Usaha CD atau DVD bajakan.

	pihak lainnya.	
Mengandung unsur <i>risywah</i>	Kegiatan usaha yang melakukan tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya untuk mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.	○ Seperti Usaha jasa pembuatan SIM atau Perpanjangan STNK atau Balik Nama BPKB (berpotensi mengandung unsur suap atau praktek illegal di dalamnya).
Mengandung unsur <i>haram</i>	Jenis usaha yang mengandung kegiatan/transaksi yang objeknya dilarang secara syariah, baik yang disebabkan oleh zatnya, maupun selain zatnya.	○ Perkebunan atau perdagangan ganja dan sejenisnya. ○ Peternakan atau perdagangan hewan yang diharamkan (contoh: babi, anjing dll.)
Mengandung unsur <i>riba</i>	Kegiatan usaha yang melakukan penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak sesuai prinsip syariah	○ Pembiayaan kepada lembaga keuangan konvensional non syariah. ○ Pembiayaan kepada rentenir atau usaha yang serupa dengan rentenir.

Sumber: Pedoman SOP KUR BSI KCP Pare Kediri 2023

Kontribusi dan Dampak Pembiayaan KUR

Program KUR yang dijalankan BSI KCP Pare Kediri memberikan kontribusi besar bagi pengembangan usaha mikro di wilayah tersebut. Pembiayaan ini tidak hanya membantu pelaku usaha mendapatkan modal kerja atau investasi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan. Dengan prinsip syariah, BSI memastikan bahwa pembiayaan dilakukan tanpa melibatkan unsur riba, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Pramuwardhani *et al.*, 2024). KUR juga memiliki dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti peningkatan kapasitas produksi, pembukaan lapangan kerja baru, dan peningkatan daya beli masyarakat (Purnama *et al.*, 2024).

Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil, meningkatkan inklusi keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian lokal maupun nasional (Cholilah *et al.*, 2023). Memberikan dampak positif ini juga yang tercermin dalam pengurangan ketergantungan pada

pinjaman rentenir, peningkatan daya saing produk UMKM, serta peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha mikro. Pembiayaan KUR BSI sejalan dengan visi untuk memberdayakan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM yang produktif dan berkelanjutan (Adha, 2023).

Dampak Positif dan Peran BSI

Meskipun menghadapi tantangan, pelaksanaan KUR di BSI Pare Kediri memiliki dampak positif yang signifikan, khususnya dalam mendukung perkembangan UMKM di wilayah tersebut. Dengan prinsip syariah, pembiayaan KUR di BSI memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang ingin menghindari pembiayaan berbasis bunga (Emmanuela *et al.*, 2024). Selain itu, program ini membantu menciptakan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada pelaku usaha mikro yang selama ini sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memberdayakan sektor UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Adapun Dampak positif yang dihasilkan dari pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) sangat luas, baik bagi pengusaha mikro, perekonomian lokal, maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan mengedepankan prinsip syariah yang adil dan transparan, BSI berperan besar dalam pemberdayaan UMKM, peningkatan inklusi keuangan, pengurangan pengangguran, serta peningkatan daya saing produk. Program KUR BSI juga mendukung penguatan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, serta menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Suhartini, 2024).

Solusi Atas Tantangan di BSI

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti peningkatan edukasi nasabah, simplifikasi proses pengajuan, pembinaan usaha secara berkala, dan sinergi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan instansi terkait. Hal ini akan mendukung optimalisasi pelaksanaan KUR serta keberlanjutan usaha nasabah. Berikut adalah langkah-langkah cara mengatasi berbagai tantangan yang ada di BSI KCP Pare Kediri: (1) Menyediakan pelatihan atau pendampingan bagi nasabah terkait literasi keuangan dan prinsip syariah. (2) Menjalani kerja sama dengan pemerintah daerah untuk

mempermudah legalitas usaha mikro. (3) Mengadopsi teknologi digital untuk mempercepat proses pengajuan dan analisis pembiayaan. (4) Meningkatkan sosialisasi dan promosi mengenai keunggulan KUR berbasis syariah dibandingkan pembiayaan konvensional.

KESIMPULAN

Pembiayaan KUR di BSI KCP Pare Kediri merupakan salah satu upaya strategis untuk memberdayakan pelaku usaha mikro dengan pendekatan berbasis syariah. Meskipun menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, solusi yang inovatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak dapat membantu meningkatkan efektivitas program ini, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui program ini, BSI memberikan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha mikro, dengan bunga rendah dan syarat yang lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Hal ini tidak hanya membantu mengembangkan usaha mereka, tetapi juga meningkatkan daya saing produk, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman rentenir.

Selain itu, BSI turut berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan di kalangan masyarakat, memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan manajemen usaha yang lebih baik. Pembiayaan KUR juga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal, dengan membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Secara keseluruhan, pembiayaan KUR oleh BSI mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi penggerak perekonomian Indonesia, serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program ini memberikan solusi yang adil dan transparan bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang dan memperkuat perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Sopingi, I., Setiawan, B., & Sibua, N. (2024). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Adha, R. B. (2023). Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kesejahteraan Penerima KUR di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(2), 240–253. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i2.215>
- Anisa, N., Hubeis, M., & Palupi, N. S. (2023). Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus di BSI KCP Bogor Pomad). *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 18(2), 152–162. <https://doi.org/10.29244/mikm.18.2.152-162>
- Cholilah, A. U., Fauziah, S., & Sopingi, I. (2023). *Pengaruh Motivasi dan Risiko terhadap Niat Mahasiswa Ekonomi Islam dalam Penggunaan Mobile Banking Bank Syariah Indonesia*. 4(2), 124–133. <https://doi.org/10.33752/jies.v4i2.5751>
- Emmanuela, S. F., Kembauw, E., & Luhukay, J. M. (2024). Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Kasus UMKM Keripik Daun Singkong Kikome Di Desa Jene'madinging). *Media Agribisnis*, 8(1), 246–264. <https://doi.org/10.35326/agribisnis.v8i1.5161>
- Ervina, N., Nasution, Y. S. J., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Aksara. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 660–671. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.707>
- Fitriana, D., K, K. C. Y., & Sopingi, I. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Profitability Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 10(1), 31–38. <https://doi.org/10.35384/jemp.v10i1.485>
- Fitriansyah, A., Sopingi, I., & Kusuma, K. C. Y. (2023). Pengaruh Kecukupan Modal dan Risiko Pembiayaan terhadap Pertumbuhan Net Profit Bank

- Umum Syariah. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 6(2), 89–100.
<https://doi.org/10.24256/joins.v6i2.4714>
- Harnilawati, Insiyanda, D. R., Sopingi, I., Indriasari, E., Nubatonis, O. E., Schouten, F. S., Suryandari, M., Udil, P. A., Veronica, & Wangge, M. (2024). *Metodologi Penelitian*. Cendekia Publisher.
- Huda, M. M., & Yunita, R. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat. *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 111–119.
<https://doi.org/10.21154/falahiya.v1i2.1114>
- Kholbi, A. N., Sopingi, I., & Kusuma, K. C. Y. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Personal Religius Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 6(2), 75–88. <https://doi.org/10.24256/joins.v6i2.4711>
- Manalu, H., Ramly, F., & Sopingi, I. (2024). Metode Penelitian Ekonomi: Konsep, Metode, dan Implementasi. In *PT. Mifandi Mandiri Digital*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Pramuwardhani, A. S. P., Magdalena, L., & Kartika, I. (2024). Prosedur Administrasi Dokumen Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Cirebon Sisingamangaraja. *Jurnal Witana*, 2(1), 36–39.
- Purnama, C., Zulfa Rahmah, Z., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., Rahmah, Y., Andriani, & Alfaina Kareem, N. (2024). Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Pertumbuhan Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 6(2), 308–318. <https://doi.org/10.36985/fabzp258>
- Rosidayanti, Sopingi, I., & Haryanti, P. (2023). Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah melalui Penyaluran Dana Kepada UMKM: Studi Kasus Pada

BWM Tebuireng Jombang. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 3(2), 165–180.
<https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v3i2.474>

Suhartini, A. (2024). Strategi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Syari'ah: Antara Peluang dan Tantangan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21(01), 364–384.
<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v21i01.823>

Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 850–863. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i2.226>

Wulandari, A. S., & Setiyowati, A. (2022). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 140–146. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6502>